

**PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2019 (STUDI KASUS:
DESA PULAU BANJAR KARI DAN DESA KOTO TUO KOPAH
DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh
SINTARI ARFITA
1710831006



Pembimbing:

- 1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA**
- 2. Dewi Anggraini, S.I.P, M.Si**

**ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
2021**

ABSTRAK

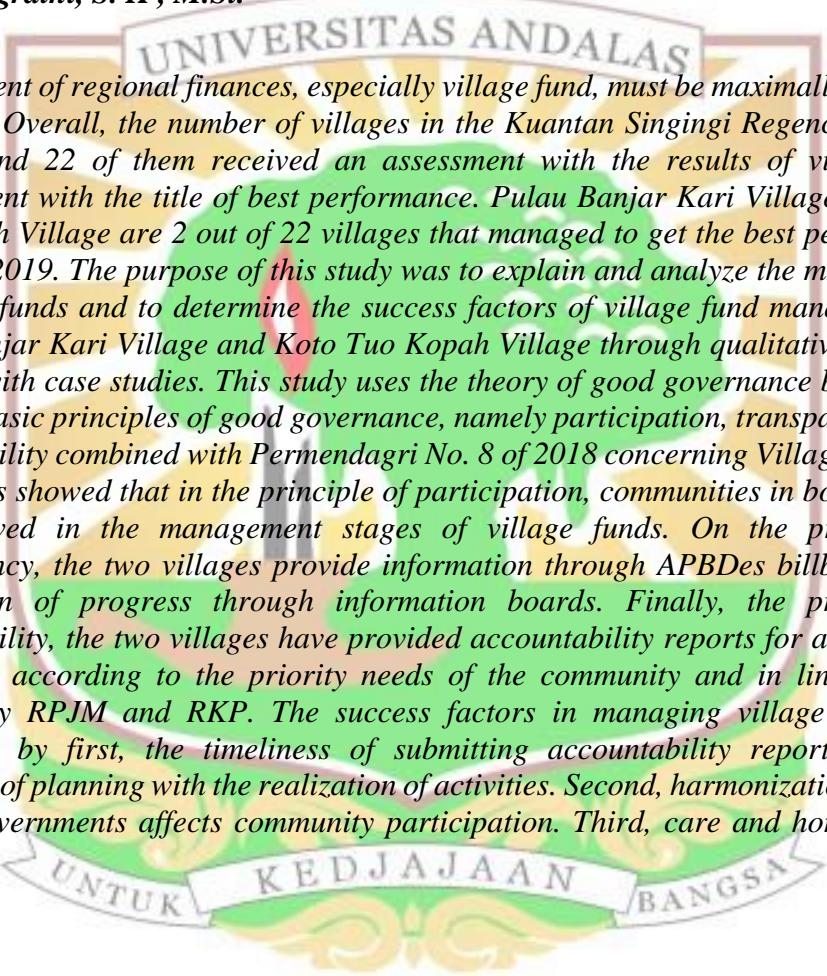
Sintari Arfita. 1710831006. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Andalas, Padang, 2021, Judul skripsi “Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Kasus: Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah)”. Dibimbing oleh: Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP, MA dan Dewi Anggraini, S.IP, M.Si

Pengelolaan keuangan daerah khususnya dana desa haruslah secara maksimal dan tepat sasaran. Secara keseluruhan jumlah desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 218 desa dan 22 desa di antaranya mendapat penilaian dengan hasil pengelolaan dana desa predikat kinerja terbaik. Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah merupakan 2 desa dari 22 desa yang berhasil mendapatkan predikat kinerja terbaik pada Tahun 2019. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pengelolaan dana desa serta untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Pulau Banjar Kari dan Desa Koto Tuo Kopah melalui metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori *good governance* dengan memfokuskan kepada tiga prinsip dasar *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang digabungkan dengan Permendagri No. 8 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsip partisipasi, masyarakat kedua desa dilibatkan dalam tahapan pengelolaan dana desa. Pada prinsip transparansi, kedua desa memberikan informasi melalui baliho APBDes dan pemberitahuan tentang progres kegiatan melalui papan informasi. Terakhir prinsip akuntabilitas, kedua desa telah memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu, kemudian sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan RPJM dan RKP kabupaten/kota. Adapun faktor keberhasilan pengelolaan dana desa dipengeruhi oleh: *pertama*, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan kesesuaian perencanaan dengan realisasi kegiatan. *Kedua*, harmonisasi antara pemerintah desa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. *Ketiga*, kepedulian dan masyarakat yang homogen.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Good Governance, Pemerintah Desa

ABSTRACT

Sintari Arfita. 1710831006. Department of Political Science. Faculty of Social Science and Political Science. Andalas University, Padang, 2021, Thesis title "Village Fund Management in 2019 (Case Study: Banjar Kari Island Village and Koto Tuo Kopah Village)". Guided by: Dr. Tengku Rika Valentina, S. IP, MA and Dewi Anggraini, S. IP, M.Si.



Management of regional finances, especially village fund, must be maximally and right on target. Overall, the number of villages in the Kuantan Singingi Regency was 218 villages and 22 of them received an assessment with the results of village fund management with the title of best performance. Pulau Banjar Kari Village and Koto Tuo Kopah Village are 2 out of 22 villages that managed to get the best performance award in 2019. The purpose of this study was to explain and analyze the management of village funds and to determine the success factors of village fund management in Pulau Banjar Kari Village and Koto Tuo Kopah Village through qualitative research methods with case studies. This study uses the theory of good governance by focusing on three basic principles of good governance, namely participation, transparency, and accountability combined with Permendagri No. 8 of 2018 concerning Village Finance. The results showed that in the principle of participation, communities in both villages are involved in the management stages of village funds. On the principle of transparency, the two villages provide information through APBDes billboards and notification of progress through information boards. Finally, the principle of accountability, the two villages have provided accountability reports for activities on time, then according to the priority needs of the community and in line with the district/city RPJM and RKP. The success factors in managing village funds are influenced by first, the timeliness of submitting accountability reports and the suitability of planning with the realization of activities. Second, harmonization between village governments affects community participation. Third, care and homogeneous society.

Keywords: Village Fund Management, Good Governance, Village Government